

Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Zaman Penjajahan II (Abad 20 Termasuk Masa Pendudukan Jepang)

Heny Kusmawati^{*1}, Misbah Khoirun Najib², Tina Rahmawati³, Dimas Ainus Shofa⁴

^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP), Indonesia*

ABSTRAK: Ethical politics focuses on building irrigation systems, organizing emigration and providing education to the Indonesian people. Ethical politics demands that the Indonesian people move towards progress, but remain under Dutch colonialism. Even though in reality ethical political policies do not necessarily bring prosperity to the Indonesian people, they are able to change the order of life of the nation, where irrigation systems are everywhere, people are familiar with modern agricultural and plantation systems. Emigration or transmigration, where people are sent outside Java, Indonesian people get to know each other and build good relationships. Education during the Dutch colonial period was initially only used to meet the needs of the Dutch in Indonesia. The education system of the Dutch colonial era was a complicated system because there were quite a lot of variations as a realization of the discrimination in the education system. The goals and educational political policies created and implemented by the Netherlands were solely for the benefit of the Dutch colonial government. Education during the Japanese colonial era, Indonesia experienced a decline in the field of education. When viewed from the side of education at that time, it was indeed very bad, while when viewed from the other side, the Japanese education system had a positive impact on Indonesia. This can be seen from the abolition of the class system (caste) which allows people from the lower middle class to go to school.

Riwayat Artikel

Received: 23-07-2023

Accepted: 24-07-2023

Kata Kunci

Ethical Politics, 20th Century Education System

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak setiap manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Dalam menyelenggarakan pendidikan itu sendiri banyak faktor yang memengaruhinya baik faktor internal maupun eksternal pada sistem pendidikan. Pendidikan pada abad ke-20 merupakan kelanjutan dari abad sebelum-nya dengan perkembangannya yang sangat pesat mengalami kemajuan terutama memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan terampil. Pendidikan pada masa itu didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial dan golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Ada banyak perbedaan pelayanan anak-anak bumiputera/ pribumi dengan anak-anak Belanda/Eropa yang berkaitan dengan status mereka. Terjadinya perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia perubahan kebijakan politik menjalankan watak kolonialisme di Indonesia. Pendidikan pertama kalinya dikaitkan dengan bagaimana mengukuhkan kekuasaannya. Banyak sekolah yang mulai berdiri di abad

CONTACT: Heny Kusmawati  hkusmawati70@gmail.com

© 2023 The Author(s). Published by Literasi Nusantara Publisher.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

ke20 munculnya sekolah-sekolah swasta dan para kaum cendekiawan sehingga memunculkan organisasi modern di masa pergerakan nasional (1908-1942).

Penyediaan fasilitas di sekolah dan sarana penunjang pendidikan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan penduduk pribumi agar dapat mengabdikan pada kepentingan kolonial Belanda. Penyelenggaraan pendidikan dengan kata lain bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu membaca dan menulis pada lembaga administrasi pemerintah kolonial dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat status dan kedudukan penjajah kolonial Belanda. Para pekerja lulusan sekolah ini kemudian mengabdikan kepada kepentingan Belanda, karena itu tujuan pendidikan diarahkan kepada kepentingan kolonial, sehingga isi pendidikan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang berfungsi untuk membantu dan mempertahankan kekuasaan elite politik dan ekonomi penjajah.

Berbeda dengan sistem pendidikan kolonial, pendidikan dan pengajaran nasional, khususnya Taman Siswa, sejak semula telah dikemas atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang sejajar dengan masyarakat Indonesia. Artinya, Taman Siswa tidak dimaksudkan untuk mendidik golongan tertentu, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tujuan pokok yang hendak dicapai adalah terlaksananya pendidikan dan pengajaran secara merata, sekaligus menanamkan nilai-nilai persatuan di atas perbedaan.

Pengalihan kekuasaan Belanda ke kekuasaan Jepang disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Sehingga muncul sebuah harapan atau keinginan baru dari masyarakat Indonesia untuk melepaskan diri dari tali jeratan penjajahan dan keinginan menjadi sebuah negara merdeka. Sedangkan di sisi lain Jepang terus menerus melakukan propaganda-propaganda untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat Indonesia serta mempertahankan kedudukannya. Bergantinya penduduk Belanda menjadi penduduk Jepang menimbulkan sebuah peralihan drastis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sistem yang berganti dan dihapuskan, seperti salah satunya penghapusan sistem golongan (kasta) yang membuat masyarakat golongan menengah ke bawah bisa bersekolah. Selanjutnya, Jepang juga merubah dan menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan. Untuk mewartakan semua kebijakan atau perubahan terhadap pendidikan Indonesia, Jepang mendirikan empat tingkat pendidikan untuk siswa dan beberapa jenis sekolah untuk guru yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Namun, bagaikan pisau bermata dua Jepang tidak menduduki hanya untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan membenahi sistem pendidikan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki maksud yang tersembunyi yang pada akhirnya hanya menyulitkan Indonesia khususnya di bidang pendidikan. Sehingga, bagaikan pinang dibelah dua, pendudukan Jepang di Indonesia tidak jauh dari masa pendudukan Belanda dan bahkan membuat rakyat lebih menderita.

Metode

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan, yang meliputi desain penelitian, populasi, dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, studi kasus,

dan sebagainya, perlu ditambah kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan yang membantu beserta cara menggali data penelitian, lokasi, dan durasi penelitian serta deskripsi pemeriksaan keabsahan hasil penelitian.

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode ini menggunakan studi pustaka sebagai obyek penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan koleksi perpustakaan-an tanpa memerlukan riset lapangan dan sumber primer. Adapun bahan-bahan kepustakaan yang dikumpulkan berasal dari Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) dan Perpustakaan Online. Tahap dari metode penelitian kepustakaan adalah membaca terlebih dahulu mengenai pendidikan pada masa kolonial Belanda di Indonesia dengan mencari referensi yang mendukung pokok permasalahan di perpustakaan yang mudah di jangkau. Selanjutnya membuat artikel di microsoft word dengan membuat subbahasan mengikuti Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Pati.

Hasil dan Pembahasan

Hakekat Politik Etis Dalam Sejarah Pendidikan Indonesia Pada Awal Abad Ke-20

Politik etis atau disebut juga politik balas budi merupakan pemikiran politik koloni Belanda di Indonesia selama empat dekade sejak tahun 1901 hingga 1942. Tentu saja pada tanggal 17 September 1901, Politik etis yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan kolonial Belanda. Kebijakan etis membuat bangsa Indonesia maju tetapi masih di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Politik Etis secara resmi diluncurkan pada bulan September 1901 ketika Wilhelmina menyampaikan pidato tahunannya. Pada awalnya Belanda dengan penuh tanggung jawab memperhatikan masyarakat pribumi dan membantu Indonesia ketika menghadapi kesulitan. Mereka berbuat demikian karena takut kritik dan takut kalau tetap membiarkan penderitaan penduduk pribumi terus menerus akan memicu timbulnya perlawanan rakyat secara meluas atau terus menerus. yang kolonialistik-eksploitatif (Daliman, A, 2012: 72).

Pada 17 September 1901 Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina (1890- 1948) mengumumkan mengenai suatu penyelidikan tentang taraf kesejahteraan masyarakat yang berada Jawa. Isi pidato dari Ratu Belanda yaitu "sebagai negara Kristen, Nedherland berkewajiban di Kepulauan Hindia-Belanda untuk lebih memperhatikan penduduk pribumi, memberikan jalan yang tegas terhadap Kristenisasi, serta meresapi keseluruhan tingkah laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Netherland mempunyai meringankan beban bangsa Indonesia dengan adanya kebijakan politik etis pada daerah ini. Berhubungan dengan itu, kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah mengalami masa penjajahan selama bertahun-tahun. Politik Etis dimulai secara resmi setelah pidato dari Ratu Belanda dan merupakan pertanda bagi dimulainya zaman baru bagi masyarakat Indonesia (Nasution, 1983: 15).

Pemerintah Belanda memegang peranan penting dalam pendidikan. Perubahan pendidikan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan Gubernur Jenderal atau dewan pendidikan yang bertindak atas nama pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan pada masa kolonial Belanda tidak didasari oleh adanya struktur organisasi yang teratur, sebab pendirian

lembaga pendidikan hanya sebagai wujud usaha pemerintah Belanda untuk mempermudah dalam pelaksanaan politiknya. Adanya lembaga pendidikan, menjadikan masyarakat berpacu untuk meningkatkan intelektual bangsa, walaupun kebijakan pendidikan masih terbatas (Ismawati, Dwi Nur, 2017: 284-285).

Prinsip politik etis hanyalah semboyan manis yang menutupi cara-cara eksploitasi bisnis besar kolonial Belanda/Eropa di Indonesia. Perilaku dari tokoh politik etis ini berperilaku etis terhadap masyarakat adat, tetapi perusahaan Belanda/Eropalah yang bertindak bukan atas dasar politik etis tetapi atas dasar kepentingan ekonomi. Oleh sebab itu para pemilik modal sangat mendukung didirikannya Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan tenaga kerja/pegawai agar mudah didapatkan dengan upah rendah, agar menjamin keuntungan maksimal untuk para pemilik modal Belanda (Hendri, 2017: 32).

Secara umum sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang diperkenalkan setelah diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengajaran bahasa Belanda (ELS (Europese Lagere School), HCS (Hollandsch Chineesche School), HIS (Hollands Inlandsche School) dan sekolah dengan pengajaran bahasa daerah (IS, VS, VgS) sebagai sekolah peralihan (2) meliputi pendidikan lanjutan Pendidikan umum (MULE (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), HBS (Hogere Burger School), AMS (Algemene Middelbare School) dan (3) pendidikan tinggi profesional, contohnya Sekolah Tinggi Kedokteran/ Geneskundige Hoge School (GHS), Sekolah Tinggi Hukum/ Rechts Hoge School (RHS), dan Sekolah Tinggi Teknik/ Technische Hoge School (THS).

Meskipun tujuan pembentukan bentuk-bentuk pendidikan tersebut nampaknya cukup baik, namun dalam praktiknya cenderung diskriminatif. Kecenderungan ini terlihat jelas saat mengamati anak sekolah. Hal itu dilakukan dengan memungut biaya sekolah yang cukup mahal, dan seringkali mengutamakan keluarga darah bangsawan (darah bangsawan, darah bangsawan) atau "priyayi" (pangreh praja, atau pegawai instansi pemerintah Belanda). Oleh karena itu, bagi kalangan bawah, hanya anggota masyarakat yang mampu atau kaya saja yang dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Bagi anggota masyarakat yang kurang mempunyai atau miskin terpaksa tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah, atau paling tidak terpaksa mengambil alternatif lain, misalnya memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren (Heny Kusmawati, 2021:45-48).

Sistem Pendidikan Kolonial Di Indonesia Sebelum Masuknya Jepang Politik pendidikan kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia mempunyai beberapa ciri-ciri pokok. Ciri-ciri umum politik pendidikan kolonial tersebut meliputi: (1) gradualisme, yaitu pemerintah kolonial Belanda sengaja bersikap lamban dalam melakukan perubahan pendidikan, (2) dualisme, yaitu menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan untuk bangsa Belanda dan untuk rakyat pribumi, (3) kontrol sentral yang kuat, yaitu segala kebijakan dalam hal pendidikan diatur oleh Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan yang bertindak atas nama atasannya, (4) keterbatasan tujuan, yaitu peranan sekolah hanya untuk menghasilkan dan mencetak pegawai rendahan, (5) prinsip konkordansi, yaitu menjaga agar sekolah-sekolah di Indonesia mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah-sekolah di negeri

Belanda, dan (6) tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis, yaitu masing-masing sekolah berdiri sendiri tanpa ada hubungan organisasi antara sekolah satu dengan yang lain sehingga tidak ada jalan untuk bisa melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi (Salindri, 1996:28).

Van Heutz (1904 – 1909) mencoba untuk menyebar luaskan pendidikan dalam skala yang lebih luas yaitu mencari tipe sekolah lain yang lebih sederhana dan lebih murah. Van Heutz mendirikan sekolah yang cocok untuk Bumiputera yaitu Sekolah Desa (Volksschool). Namun Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Idenburg (1909 – 1916) memiliki kebijakan yaitu ingin menyatukan sekolah yang pada awalnya lepas dan tidak berhubungan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan yang bulat dan sistematis karena pada tahun 1910 mulai disadari bahwa tidak ada hubungan antar sekolah untuk anak pribumi (Fajar Shidiq Sofyan Heru, Sumardi, Nurul Umamah, 2014:3-5).

Tujuan pendidikan di masa kolonial tidak pernah dinyatakan secara tegas, tetapi dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan itu antara lain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kasar untuk kepentingan ibukota Belanda, ada juga yang bekerja sebagai staf administrasi, staf teknis, Pekerja pertanian dan karyawan asing atau tingkat ketiga lainnya dilatih dan dididik. Permintaan akan tenaga kerja semakin meningkat karena semakin menyesuaikan dengan perkembangan industri Belanda yang semakin berkembang, oleh karena itu pemerintah kolonial membutuhkan tenaga- tenaga terdidik untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintah kolonial. Dari mata pelajaran yang diajarkan, ada empat mata pelajaran wajib yaitu membaca, menulis, bahasa (belanda harus diajarkan) dan berhitung. Sistem persekolahan pada jaman kolonial Belanda abad ke-20 terdiri atas tiga jenjang pendidikan yaitu (1) Pendidikan Rendah (Lager Onderwijs) yang dibagi menjadi dua yaitu Sekolah Rendah Berbahasa Pengantar Bahasa Belanda dan Sekolah Rendah Berbahasa Pengantar Bahasa daerah atau Melayu. (2) Pendidikan Menengah (Middlebaar Onderwijs), (3) Pendidikan Tinggi (Mudyaharjo, 2006:266).

Sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900-1942 memiliki komponen-komponen pendidikan yang terdiri dari (1) tujuan pendidikan; (2) kurikulum; (3) peserta didik; (4) pendidik atau guru; (5) anggaran pendidikan; (6) lulusan atau tamatan. Komponen-komponen tersebut harus ada dalam pendidikan karena merupakan sebuah sistem yang menggerakkan pendidikan sehingga pengajaran dapat berjalan.

Ciri pendidikan kolonial Belanda terbentuk dari kebijakan pendidikan yang dikendalikan oleh kelas penguasa yang tidak menginginkan perkembangan pendidikan bagi bangsa Indonesia, sehingga berdampak pada praktik pendidikan yang penuh dengan diskriminasi antara pemerintahan kolonial Belanda. Orang, yaitu gradasi, dualisme, kontrol pusat yang kuat, tujuan yang terbatas, kesesuaian prinsip dan kurangnya kontrol pedagogis yang sistematis. Fitur-fitur ini hanya dihapus selama pendudukan Jepang. Sistem pendidikan berlaku untuk semua orang, tanpa perbedaan. Kemudian sekolah mengintervensi agar bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengajaran selain bahasa Jepang.

Berkembangnya Pendidikan Yang Bersifat Nasional Indonesia Di Awal Abad Ke- 20 (Studi Kasus Tentang Taman Siswa, NIS, Muhammadiyah Dll)

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Upaya bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan salah satunya ditandai dengan berdirinya perguruan Tamansiswa yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1922 oleh Ki Hadjar Dewantara.

Upaya pemerintah Indonesia di bidang pendidikan harus menunjuk tokoh-tokoh pendidikan yang hadir. Ki Hadjar Dewantoro diangkat sebagai Menteri Pendidikan yang pertama, sementara Moch Syafei dan Mr Suwandi juga memegang jabatan penting di Kementerian Pendidikan. Untuk memberikan landasan hukum bagi pembangunan bidang pendidikan, setelah revolusi lima tahun, sebuah panitia yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantoro berhasil menyusun dan kemudian melaksanakan UUD Pendidikan pada tahun 1950, dan pada tahun 1954 disahkan sepenuhnya. Republik Indonesia. Upaya pengembangan pendidikan hanya pada tataran konseptual dan belum terlaksana dengan baik. Misalnya Prof. Dr. Priyono membuat kurikulum bernama Sapta Usaha Tama, yang kemudian diubah menjadi Panca Wardana dan kemudian menjadi program Panca Cinta. Ternyata program-program tersebut tidak memperbaiki sektor pendidikan, tetapi menimbulkan kontradiksi internal di antara para pendidik yang saat itu sudah memiliki cara pandang yang terpecah. Program-program tersebut dipandang dan diduga sebagai upaya sengaja menghapuskan pendidikan agama. Keadaan ini tentu saja negatif bagi perkembangan pendidikan. Memang ada upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan, terutama pada sarana dan prasarana pendidikan, tetapi kebijakan politik tetap menjadi panglima di dalam penentuan kebijakan pendidikan (Heny Kusmawati, 2021:50-51).

Karakter dan Sistem Persekolahan Di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan dan pengajaran sangat menurun, pada wilayah tertentu sekolah-sekolah dapat dikatakan rendah, bahkan fokus untuk meningkatkan pendidikan tidak ada. melalui kebijakan yang mempersulit kebijakan sektor pendidikan, mereka seolah mampu mengisi kesenjangan pendidikan yang menghambat perubahan budaya. Banyak perubahan sistem pendidikan yang berubah pada masa penjajahan Jepang ketika sistem pengelompokan bangsa menurut golongan atau status sosial dihapuskan pada masa pendudukan Jepang. Walaupun mengalami kemunduran, namun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang bertujuan untuk menghilangkan konsep pembelajaran kolonial Belanda. Pembelajaran pada waktu itu menekankan pada penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang, serta unsur budaya Belanda mulai perlahan di hilangkan pada setiap pembelajaran (Nur Fahrozy, Sofyan Iskandar, Yunus Abidin, Mia Zultrianti Sari, 2022:3097).

Pergantian pendudukan Belanda ke pendudukan Jepang menyebabkan perubahan drastis di beberapa bidang, termasuk bidang pendidikan. Hal ini tercermin dari banyaknya sistem atau regulasi yang diubah dan dibatalkan. Sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Jepang di Indonesia termasuk kurikulum yang berorientasi lokal. Hal ini dikarenakan Jepang tidak menerapkan pendidikan Nipponize (Japanisasi) di Manchuria. Oleh karena itu, Jepang menerapkan kombinasi kurikulum lokal dan kurikulum Jepang di Indonesia. Penghapusan mekanisme pendidikan yang diperkenalkan oleh Belanda digantikan dengan mekanisme yang dibuat oleh Jepang, yang mengharuskan pemerintah Jepang menata kembali 15 lembaga pendidikan di Indonesia (Suci Ramadhani, 2021:14-16). Untuk tujuan ini, pemerintah Jepang telah menerbitkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Format pendidikan mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa akibatnya kegagalan Jepang dalam mengaplikasikan Nipponize (Jepangisasi) pendidikan di Manchuria. Di Indonesia, Jepang menerapkan perpaduan antara kurikulum lokal dengan kurikulum Jepang.
- b. Mengambil tenaga pribumi, yaitu dengan merekrut Ki Hajar Dewantara sebagai penasehat bidang pendidikan. Pengambilan tenaga pribumi ini bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia.
- c. Melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan dari pemerintahannya. Pada awal pergantian sistem pendidikan ini, tidak banyak guru yang mengerti akan maksud, tujuan, dan pemahaman materi pendidikan buatan Jepang. Untuk itu diadakan sebuah pelatihan untuk para guru. Adapun materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: 1) Nippon Seisyin, yaitu latihan semangat Jepang dan kemiliteran; 2) indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu; 3) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; 4) Bahasa, sejarah dan adat istiadat Jepang; serta 5) Nyanyian dan olahraga Jepang.
- d. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda diinstruksi untuk segera dihapus atau ditutup, dan terjadi pelarangan materi tentang Belanda dan Bahasa-bahasa Eropa lainnya. Sehingga dengan hal ini Peranakan China dipaksa untuk kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Hua-Chino Tsung Hui, yang berimplikasi pada adanya proses resinification (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa China).
- e. Pemerintah Jepang sering mengadakan kunjungan dan memberi bantuan ke pondok pesantren. Kunjungan ke pondok pesantren dan memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan Islam tersebut terjadi hampir setiap minggu. Hubungan dengan para pemimpin pondok semakin dipererat agar Jepang kedudukannya semakin kuat dari pengaruh kiai tersebut (Sabarudin, 2015:139- 174).
- f. Mengizinkan pembentukan garis Hizbullah yang memberikan pelatihan dasar Milisi Pemuda Islam di bawah K.H. Zainal Arifin; untuk memungkinkan Yayasan Perguruan Tinggi Islam di Jakarta oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta.

- g. Di izinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang bakal menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan.
- h. Di izinkannya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Musimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar islam, Muhammadiyah dan NU.
- i. Kantor Voor Islamistische Zaken pada zaman Belanda, dijalankan oleh para orientalis Jepang menjadi Sumubi. Dimana kepemimpinan diserahkan kepada rakyat Indonesia, demikian salah satu tokoh Islam yang menjadi pemimpinnya, K.H. Hasyim Asy'ari. Selain itu, organisasi Islam yang sudah ada di zaman Belanda dan diurus oleh Belanda kemudian diberikan hak penuh oleh Jepang kepada umat Islam untuk mengurus organisasi Islam tersebut, yang secara langsung diserahkan kepada K.H. Hasyim Asy'ari (Aslan dan Hifza 2019: 171-188). Hilangnya kekuasaan Belanda diikuti tumbangannya sistem pendidikan yang didirikan oleh Belanda menyebabkan sekolah-sekolah dengan sistem pembedaan golongan ikut lenyap dan berganti dengan sistem yang merata tanpa memandang golongan (kasta). Sehingga dengan ini masyarakat golongan bawah bisa bersekolah. Hal ini dapat dilihat pada masa Belanda, yaitu rakyat yang dapat merasakan pendidikan formal hanya rakyat pribumi untuk kalangan atas, sementara rakyat kecil tidak bisa memiliki kesempatan. Sedangkan untuk mengenyam pendidikan, Jepang mulai menerapkan pola pendidikan semua rakyat dan lapisan. Hal ini memungkinkan rakyat golongan menengah kebawah berhak untuk mengenyam pendidikan formal yang dibuat oleh Jepang tanpa membedakan golongan kasta.

Simpulan

Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Pada akhir abad 19, para pegawai kolonial baru yang datang dari negeri Belanda menuju Indonesia sudah memiliki suatu pemikiran tentang pemerintah kolonial ini. Politik etis membawa sedikit perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dimana ada tiga kebijakan baru yang diterapkan, yaitu pendidikan (education), irigasi (pengairan) dan emigrasi (perpindahan penduduk). Adanya politik etis ini masyarakat diharapkan memiliki hidup yang lebih baik dan makmur. Namun politik etis ini ternyata hanya menguntungkan pemerintah Belanda, dimana kebijakan politik etis ini hanya memberikan banyak manfaat bagi bangsa Kolonial Belanda.

Secara umum sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang diperkenalkan setelah diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengajaran bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS) dan sekolah dengan pengajaran bahasa daerah (IS, VS, VgS) sebagai sekolah peralihan (2) meliputi pendidikan lanjutan Pendidikan umum MULE, HBS, AMS dan (3) pendidikan tinggi professional, contohnya GHS, RHS, dan THS.

Pendidikan nasional didirikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermanfaat untuk memajukan bangsa Indonesia. Lembaga, guru-guru pengajar, dan para

muriel, sejak semula telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, sehingga mudah untuk mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi.

Pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang sangatlah buruk. Hal ini terlihat dari perubahan dan penurunan yang terjadi. Namun, disamping itu Jepang juga memberikan dampak positif bagi pendidikan Indonesia, seperti dengan melepaskan Indonesia dari belenggu kekuasaan Belanda, Jepang telah merubah sistem dan kebijakan pendidikan Indonesia buatan Belanda yang sangat tidak menguntungkan masyarakat golongan bawah. Selain itu, Jepang juga telah membukakan mata dan memberikan dorongan (dengan kekejamannya) bagi masyarakat Indonesia untuk terus berjuang dan berambisi agar dapat merdeka seutuhnya.

Referensi

- Daliman, A. (2012). *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Nasution, S. (2014). *Sejarah Pendidikan Indonesia, Cetakan kelima*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismawati,
- Dwi Nur. (2017). *The Intellectual's Contribution In The National Movement of In Indonesian 1908-1928*.
- Hendri, H. (2017). *Kebijakan Politik Pendidikan Tinggi Pemerintah Kolonial Belanda Di Indonesia (1920- 1942)*. *Diakronika*, 17(1), 32.
- Heny Kusmawati, M.S.I. (2021). *Sejarah Pendidikan Dari Masa Klasik Hingga Masa Digital*. Pati: Al-qalam.
- Nur Fahrozy, Sofyan Iskandar ,Yunus Abidin , Mia Zultrianti Sari,(2022). *Upaya Pembelajaran Abad 19-20 dan Pembelajaran Abad 21 di Indonesia*. *Research & Learning in Elementary Education*,6(2), 3093 – 3101.
- Prayudi, G., & Salindri, D. (2015). *Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942*. *Publika Budaya*, 3(1), 20–34.
- Fajar Shidiq Sofyan Heru, Sumardi, Nurul Umamah. (2014). *Sistem Pendidikan Kolonial Belanda Di Indonesia Tahun 1900 – 1942*. Universitas Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 1(8),3-5.
- Mudyahardjo, R. (2006). *Pengantar Pendidikan - Sebuah Studi Awal Tentang Dasar- Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suci Ramadhani. (2021). *Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang*. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 6(1), 14-16.
- Sabarudin, M. (2015). *Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan*. *Jurnal Tarbiya*, 1(1), 139–174.
- Aslan, A., & Hifza, H. (2019). *Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang di Sambas, Indonesia*. *Edukasia Islamika Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 171-188.